



# KABUPATEN BANGKA



## LAPORAN KINERJA KECAMATAN MENDO BARAT 2024

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan nikmat dan karunia-NYA sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat menggambarkan capaian kinerja tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Mendo Barat ditahun 2024 sehingga bisa menjadi bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan dapat menjadi tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang.

Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan laporan kinerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024. Namun, kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan laporan kinerja ini ditahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mendo Barat.

Petaling Banjar, 31 Januari 2025

**CAMAT MENDO BARAT,**



**HISMUNANDAR, SH**  
**Pembina TK. I / IV b**  
**NIP. 19670225 199503 1 001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	I.1
B. Landasan Hukum .....	I.2
C. Maksud dan Tujuan .....	I.3
D. Gambaran Umum Organisasi .....	I.3
E. Isu Strategis .....	I.9
F. Sistematika .....	I.12
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	II.1
B. Indikator Kinerja Utama .....	II.3
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	II.4
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	III.1
B. Realisasi Anggaran .....	III.23
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	IV.1
<b>LAMPIRAN:</b>	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
2. Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan kinerja secara periodik. Pelaporan tersebut dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan kepada setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyelenggarakan SAKIP yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 4A Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan kinerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi kinerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Mendo Barat untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

### D. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Mendo Barat merupakan salah satu kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka yang terdiri dari 15 (Lima Belas) desa : Desa Petaling, Desa Air Duren, Desa Cengkong Abang, Desa Kace, Desa Kace Timur, Desa Kemuja, Desa Zed, Desa Paya Benua, Desa Mendo, Desa Labuh Air Pandan, Desa Rukam, Desa Air Buluh, Desa Penagan, Desa Kota Kapur dan Desa Petaling Banjar, dimana dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bangka merupakan satuan kerja yang mempunyai fungsi sebagai perencana, pelaksana, pelapor dan pengawas yang terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan data yang up to date dan akurat yang bertanggung jawab langsung kepada perangkat daerah kabupaten.

Dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan dengan indikator yang telah terukur melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) guna mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

#### 1. Struktur Organisasi

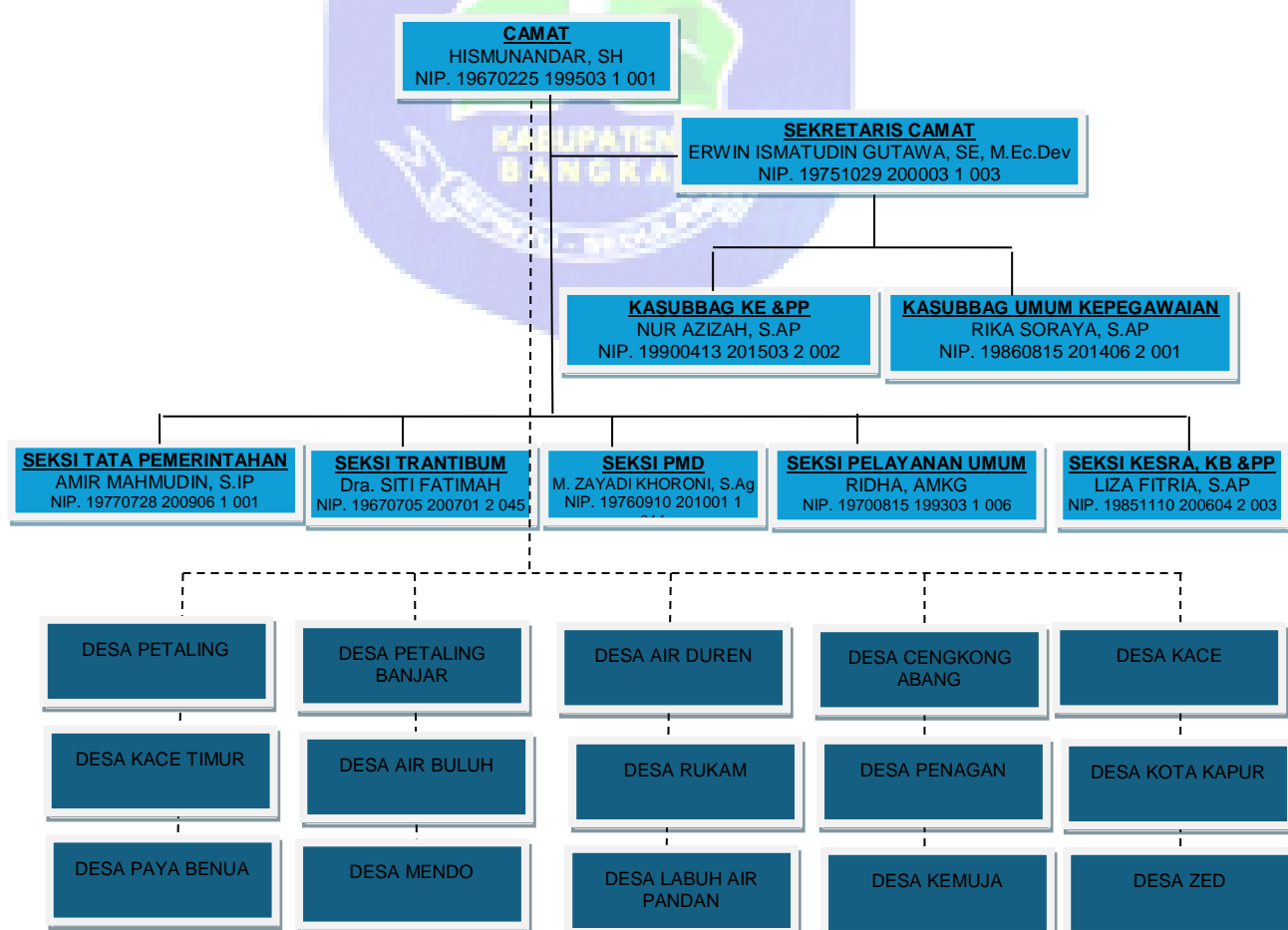
Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dimana Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Lebih lanjut susunan organisasi kecamatan Mendo Barat digambarkan sebagai berikut :

**TABEL 1.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024**





## 2. Kondisi Pegawai dan Kondisi Sarana Prasarana

### 2.1 Kondisi Pegawai

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, saat ini Kecamatan Mendo Barat memiliki pegawai sebanyak 48 orang, yang terdiri dari 16 orang PNS dan 32 orang Tenaga Kontrak yang memiliki kualifikasi pendidikan beragam mulai dari SMA hingga S2. Lebih lanjut kondisi pegawai yang ada di Kecamatan Mendo Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 1.2**  
**Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal**  
**PNS dan Non PNS di Kecamatan Mendo Barat Kab. Bangka**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Jenjang Pendidikan	PNS (Orang)			Non PNS (Orang)			Total
		Laki-laki	Wanita	Jumlah	Laki-laki	Wanita	Jumlah	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	6	1	7	3	9	12	19
4	DIPLOMA	1	1	2	-	1	1	3
5	S- 1	3	3	6	7	12	19	25
6	S- 2	1	-	1	-	-	-	1
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>48</b>

**Tabel 1.3**  
**Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta**  
**Jabatan Struktural dan Fungsional di Kecamatan Mendo Barat Kab. Bangka**  
**Per 31 Desember 2024**

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	3	4	-	7
Diploma	-	-	2	-	2
Strata 1	-	-	5	1	6
Strata 2	-	-	-	1	1
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>16</b>

Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumah
<b>Struktural :</b>	<b>9</b>
a. Ess. II	-
b. Ess. III	2
c. Ess. IV	7
d. Ess. V	-
e. Non Ess.	7
<b>Fungsional :</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>16</b>



**Tabel 1.4**  
**Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan di**  
**Kecamatan Mendo Barat Kab. Bangka Per 31 Desember 2024**

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan						Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Strata 1	Strata 2	
Operator Komputer	-	-	6	1	2	-	9
Caraka	-	-	-	-	1	-	1
Petugas Kebersihan	-	-	1	-	-	-	1
Petugas jaga malam	-	-	1	-	-	-	1
Sopir	-	-	-	-	-	-	-
Petugas Adm.Pemerintahan/STPN	-	-	-	2	16	-	18
Pengelola Web Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1
Petugas Arsip	-	-	1	-	-	-	1
<b>Total</b>	-	-	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	-	<b>32</b>

**TABEL 1.5**  
**Data PNS Berdasarkan Diklat Yang diikuti**

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	PIM IV/Setara	2
2	PIM III/Setara	2
3	PIM II	-
4	Diklat Fungsional :	
	1. Pengawas Fungsional	-
	2. Bendahara Daerah	1
	3. Manajemen Pemerintahan	-
	4. Kursus Bendahara	-
	5. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	-

## 2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kantor Camat Mendo Barat untuk saat ini dinilai belum cukup memadai untuk mendukung berbagai kegiatan yang ada di Kecamatan, terlebih dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibutuhkan ruangan yang refrenstatif dan kendaraan operasional yang cukup demi kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Lebih lanjut kondisi sarana dan prasarana kantor Camat Mendo Barat diterangkan pada tabel berikut :

**TABEL 1.6**  
**Data Sarana dan Prasarana Kantor Camat Mendo Barat**  
**Per 31 Desember 2024**

NO	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi			Keterangan
			Baik (Unit)	Rusak (Unit)	Rusak Berat	
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	2.343 M <sup>2</sup>	√	-	-	
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.325 M <sup>2</sup>	√	-	-	
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	2	√	-	-	
4.	Kendaraan Dinas Roda 2	4	√	-	-	
5.	Alat Semprot Rumput	1	√	-	-	
6.	Filling Cabinet Besi	8	√	-	-	
7.	Brankas	1	√	-	-	
8.	Almari	13	√	-	-	Almari Kaca, dan Kayu
9.	Springbed	2	√	-	-	
10.	Meja Kerja	34	√	-	-	
11.	Kursi Kerja	38	√	-	-	
12.	Kursi Tamu	1	√	-	-	
13.	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	3	√	-	-	
14.	Kursi Lipat	2	√	-	-	
15.	Sofa	2	√	-	-	

16.	Mesin Pemotong Rumput	1	√	-	-	
17.	Kursi Rapat	20	√	-	-	
18.	Gordain	1	√	-	-	
19.	Komputer PC	8	√	-	-	
20.	Laptop	6	√	-	-	
21.	Printer	7	√	-	-	
22.	Meja Komputer	2	√	-	-	
23.	Bendera Hias	2	√	-	-	
24.	Papan Nama Beton	1	√	-	-	
25.	Kursi Plastik	32	√	-	-	
26.	Kipas Angin	6	√	-	-	
27.	Mimbar Podium	1	√	-	-	
28.	Televisi	1	√	-	-	
29.	Papan White Board	1	√	-	-	
30.	Pagar Kantor	1	√	-	-	
31.	Penampungan Air Bersih	2	√	-	-	
32.	Penambah Daya Listrik	1	√	-	-	
33.	Rumah Dinas Camat Mendo Barat	1	√	-	-	
34.	Rumah Dinas Sekretaris Camat	1	√	-	-	
35.	Rumah Dinas Staf	2	√	-	-	
36.	Gedung	1	√	-	-	
37.	Bangunan Gedung Kantor Camat	1	√	-	-	
38.	Bangunan Gedung Serbaguna	1	-	-	√	
39.	Bangunan Toilet Gedung Serbaguna	1	-	-	√	
40.	Kursi Tunggu	2	√	-	-	
41.	Dispenser	1	√	-	-	
42.	Tablet	1	√	-	-	
43.	Overhead Projector	1	√	-	-	

44.	Camera Video	1	√	-	-	
45.	Thermometer Infrared	1	√	-	-	
46.	Mesin Absensi Elektronik (Finger Print)	1	√	-	-	
47.	Gedung Rapat Kantor Kec. Mendo Barat	1	√	-	-	

### 3. Tugas dan Fungsi

Kecamatan Mendo Barat mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban dengan fungsi :

- Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
- Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan;
- Memiliki kemampuan untuk mendinaminasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
- Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
- Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi.

### E. Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan dinamika lingkungan strategis sebagai berikut :

#### 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan

berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan perkembangan dan perubahan kebijakan serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

## 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*service execelet*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan *Public Complaint*. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Goverment*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma sebagai “*Pelayan Masyarakat*”.

Selain itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan peningkatan efektifitas dan efesiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Mendo Barat dalam makna lain adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor Penyelenggaraan Negara (*Public Service Reform*) dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

## 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Goverment*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi.

Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan Kelembagaan/Organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Penyelenggaraan Manajemen Publik menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka dan masyarakat umum sebagai Stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna dan lain lain, serta Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai Shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektivitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *Reward and Punishment System* perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

#### 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.

Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *Entrepreneur Management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kepada kinerja bukan kebijakan.

Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*Financial Management System*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *Good Goverment* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal.

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan mendasarkan konsep *Value for Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahapan yaitu : Perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan Pengelolaan Barang Daerah, antara lain adalah :

- 1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang investasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan;
- 2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- 3) Pengamanan barang daerah;
- 4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

#### **F. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**



#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Akhir Renstra yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja
2. Laporan Capaian Kinerja

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026 dilakukan secara bertahap dan berjenjang mulai dari pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan *stakeholders*, Forum Perangkat Daerah sehingga Renstra Kecamatan Mendo Barat ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Mendo Barat dengan *Stakeholder*.

Rencana Strategis Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026 telah di review dengan memperhatikan beberapa perubahan seperti adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026 ini kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mendo Barat yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (1) satu tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada (1) satu tahun mendatang.

Berdasarkan keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPD dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Mendo Barat serta dengan mempertimbangkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis yang ada, maka terdapat tujuan Kecamatan Mendo Barat yang ingin diwujudkan dalam periode tahun 2024-2026 sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026.

## **1. Tujuan dan Indikator**

### **1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan (3) tiga tahun kedepan. Adapun tujuan Kecamatan Mendo Barat yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026 adalah :

- Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan;
- Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

### **1.2. Indikator**

Untuk mengukur ketercapaian dari tujuan Kecamatan Mendo Barat pada akhir periode Renstra Kecamatan Mendo Barat tersebut, dapat diukur melalui indikator tujuan yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat;
- Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

## **2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran**

### **2.1. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Perangkat Daerah Kecamatan Mendo Barat dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Mendo Barat sesuai dengan Renstra Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026, yaitu :

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat;
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

## 2.2. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran strategis yang ingin dicapai tersebut diukur melalui indikator sebagai berikut :

- Persentase Masyarakat yang Dilayani Sesuai SOP;
- Persentase Desa Mandiri;
- Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja jangka menengah dalam Renstra Kecamatan Mendo Barat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, sasaran dan indikator kinerja jangka menengah pelayanan PD**  
**Kecamatan Mendo Barat**  
**Tahun 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke -		
				1	2	3
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	89,00	91,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang Dilayani Sesuai SOP	100%	100%	100%
		Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	27%	33%	40%
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	25,50	25,75	26,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (70,10)	BB (73,25)	BB (74,60)

### B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mendo Barat dengan Tujuan “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah” secara rinci disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN MENDO BARAT**  
**KABUPATEN BANGKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB
			DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang Dilayani Sesuai SOP	Jumlah Masy yg dilayani Sesuai SOP ----- X100% Jumlah Masy yg dilayani dalam setahun	Kec.Mendo Barat	Kec.Mendo Barat
2.	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa dg Status Desa Mandiri ----- X100% Jumlah Seluruh Desa	Dinpempdes	Kec.Mendo Barat
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Inspektorat	Kec.Mendo Barat

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Renstra Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka 2024-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024. Perjanjian kinerja ini juga mencantumkan rencana anggaran untuk setiap programnya. Besaran anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam APBD induk Tahun Anggaran 2024. Rincian Perjanjian Kinerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024 adalah sebagai disajikan sebagai berikut :



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HISMUNANDAR, SH  
Jabatan : CAMAT MENDO BARAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HARIS AR, AP., M.H  
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA  
  
M. HARIS AR, AP., M.H

Bangka, 29 Januari 2024  
PIHAK PERTAMA  
  
HISMUNANDAR, SH  
BANGKA PEMBINA TK. I  
NP. 19670225 199503 1 001



**PERJANJIAN KINERJA**

**SKPD : KECAMATAN MENDO BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN : 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang Dilayani Sesuai SOP	%	100
2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	27,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori /Nilai	BB (70,10)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.520.037.514,00	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.700.000,00	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	48.705.000,00	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.800.000,00	APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.470.000,00	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>2.607.712.514,00</b>	

PIHAK KEDUA  
  
**M. HARIS AR, AP., M.H**

Sungailiat, 29 Januari 2024  
 PIHAK PERTAMA  
  
**HISMANANDAR, SH**  
 PEMBINA TK. I  
 NIB. 0670225 199503 1 001

Selanjutnya dalam rangka mengakomodir adanya perubahan alokasi anggaran program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 dilaksanakan reviu terhadap perjanjian kinerja 2024. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana huruf E dijelaskan : Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut, yaitu :



1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun rincian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HISMUNANDAR, S.H.  
Jabatan : CAMAT MENDO BARAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HARIS AR, AP., M.H.  
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA



M. HARIS AR, AP., M.H.

Sungailan, 11 November 2024



HISMUNANDAR, S.H.  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19670225 199503 1 001

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : KECAMATAN MENDO BARAT  
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang Dilayani Sesuai SOP	%	100	100
2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	27,00	27,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai	BB (70,10)	BB (70,10)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.520.037.514	2.783.935.896	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.700.000	2.700.000	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	48.705.000	35.465.000	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.800.000	4.800.000	APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.470.000	31.470.000	APBD
TOTAL		2.607.712.514	2.858.370.896	

PIHAK KEDUA  
M. FARIS AR, AP., M.H.

11 November 2024  
PIHAK PERTAMA  
HUSNUNNAR, S.H.  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19670225 199503 1 001

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja tersebut, kecamatan Mendo Barat Menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama satu tahun.

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 dilaksanakan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh seksi dan bagian lingkup kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten yang berguna dalam pengambilan keputusan sebagai upaya perbaikan kinerja kecamatan Mendo Barat selanjutnya.

Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kasi dan kasubbag dilingkup kecamatan mendo barat. Setiap kasi/kasubbag menyusun kartu kendali kegiatan selama tahun berjalan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya dibahas secara berkala melalui rapat koordinasi dengan seluruh kasi dan kasubbag yang ada di kecamatan mendo barat. Selain itu dilakukan rapat dengan seluruh pegawai yang membahas capaian kinerja yang berjenjang mulai dari pelaksana (staf), Pejabat Eselon IV, Eselon III sampai dengan pimpinan OPD pada tahun sebelumnya guna perbaikan/peningkatan kinerja ditahun berikutnya.

Kecamatan Mendo Barat sebagai entitas akuntabilitas kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan;
2. Membandingkan realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dengan sasaran (target) kinerja tahunan yang direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Adapun predikat nilai capaian kinerjanya dapat dirinci seperti yang tercantum dibawah ini :

**Tabel 3.1 A**  
**Predikat Capaian Kinerja**

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	>100%	Melebihi/Melampaui Target
2	=100%	Sesuai Target
3	<100%	Tidak Mencapai Target

Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap penyebab terjadinya keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja sehingga kedepannya bisa dilakukan perbaikan. Hal ini bisa bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### • Analisis Capaian Kinerja Tahun ini (2024)

Pada tahun 2024, Kecamatan Mendo Barat melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan. Secara rinci, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Mendo Barat, diantaranya :

#### **Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan atau aktivitas yang terorganisir dan terencana yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu berdasarkan capaian dan rencana yang telah disusun sebelumnya. Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mendo Barat pada tahun 2024 diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

#### **Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mendo Barat di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
8. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
9. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
10. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

### **Sub Kegiatan**

Sub Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Pada tahun 2024, terdapat 19 (sembilan belas) sub kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mendo Barat, diantaranya :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
5. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
6. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
7. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
12. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
13. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
14. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;



15. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
16. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
17. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
18. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
19. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Secara rinci, Capaian kinerja untuk seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Kecamatan Mendo Barat**  
**Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			100%
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	100%
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1.3.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.3.2	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.3.3	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	100%
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	6 Unit	6 Unit	100%



	Operasional atau Lapangan			
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	15 Unit	100%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	105 Lembaga	105 Lembaga	100%
3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	26 Laporan	100%
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			
4.1.1	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
<b>5.1</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			
5.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	317 Dokumen	317 Dokumen	100%
5.1.2	Sub Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	100%

Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Selain itu, pelaporan kinerja juga didasarkan dari Perjanjian Kinerja yang telah disusun sehingga dapat dilihat adanya 3 (tiga) sasaran strategis dan juga 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang juga ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026 dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP;
- Sasaran 2: Meningkatnya Upaya pemberdayaan Masyarakat dengan indikator Persentase Desa Mandiri;
- Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

Lebih lanjut, capaian terhadap ketiga sasaran tersebut adalah :

- **Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat. Pengukuran kinerja sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**  
**Di Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024**

No	Indikator				Capaian Indikator Kinerja
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	
1	Persentase Masyarakat yang Dilayani Sesuai SOP	%	100	100	100%

Capaian sasaran ini dapat dikatakan telah sesuai dengan target dimana target 100% dengan realisasi 100%.

- **Sasaran 2 : Meningkatnya Upaya pemberdayaan Masyarakat**

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan Upaya pemberdayaan Masyarakat yang diukur melalui indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Sasaran Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat**  
**Di Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024**

No	Indikator				Capaian Indikator Kinerja
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	
1	Persentase Desa Mandiri	%	27	47	174%

Capaian untuk sasaran ini dapat dikatakan melebihi target yang ditetapkan Dimana target 27% namun realisasi sudah melebihi yaitu sebesar 47%.

**REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024**

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
19	KEPULAUAN BANGKA	1901	BANGKA	190104	MENDO BARAT	1901042001	PETALING	0,8171	0,7667	1	0,8613	MANDIRI
19	KEPULAUAN BANGKA	1901	BANGKA	190104	MENDO BARAT	1901042002	PENAGAN	0,9257	0,7667	0,7333	0,8086	MAJU
19	KEPULAUAN BANGKA	1901	BANGKA	190104	MENDO BARAT	1901042003	ZED	0,8	0,6667	0,8667	0,7778	MAJU
19	KEPULAUAN BANGKA	1901	BANGKA	190104	MENDO BARAT	1901042004	MENDO	0,8286	0,7333	0,8	0,7873	MAJU
19	KEPULAUAN BANGKA	1901	BANGKA	190104	MENDO BARAT	1901042005	PAYA BENUA	0,8114	0,7333	0,8667	0,8038	MAJU
19	KEPULAUAN BANGKA	1901	BANGKA	190104	MENDO BARAT	1901042006	CENGGONG ABANG	0,8629	0,7667	0,9333	0,8543	MANDIRI
19	KEPULAUAN BANGKA	1901	BANGKA	190104	MENDO BARAT	1901042007	KACE	0,8229	0,7833	0,9333	0,8465	MANDIRI
19	KEPULAUAN BANGKA	1901	BANGKA	190104	MENDO BARAT	1901042008	KEMUJA	0,84	0,8167	0,9333	0,8633	MANDIRI
19	KEPULAUAN BANGKA	1901	BANGKA	190104	MENDO BARAT	1901042009	AIR DUREN	0,84	0,7667	0,8667	0,8244	MANDIRI
19	KEPULAUAN BANGKA	1901	BANGKA	190104	MENDO BARAT	1901042010	KOTA KAPUR	0,84	0,7333	0,8	0,7911	MAJU
19	KEPULAUAN BANGKA	1901	BANGKA	190104	MENDO BARAT	1901042011	AIR BULUH	0,8457	0,8	0,6667	0,7708	MAJU
19	KEPULAUAN BANGKA	1901	BANGKA	190104	MENDO BARAT	1901042012	RUHAM	0,8514	0,7333	0,8	0,7949	MAJU
19	KEPULAUAN BANGKA	1901	BANGKA	190104	MENDO BARAT	1901042013	LABUH AIR PANDAN	0,7943	0,7333	0,8667	0,7981	MAJU
19	KEPULAUAN BANGKA	1901	BANGKA	190104	MENDO BARAT	1901042014	KACE TIMUR	0,8514	0,75	1	0,8671	MANDIRI
19	KEPULAUAN BANGKA	1901	BANGKA	190104	MENDO BARAT	1901042015	PETALING BANIAR	0,8971	0,7333	0,8667	0,8324	MANDIRI

Di sahkan Team Verifikasi



Pendamping Desa



JUMHER

- **Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**  
sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang diukur melalui indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD**  
**Di Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024**

No	Indikator				Capaian Indikator Kinerja
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	
1	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,10	68,28	97%

Capaian untuk sasaran ini dapat dikatakan belum sesuai dengan target sehingga harus dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah salah satunya melalui penyempurnaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama Kecamatan Mendo Barat. Terdapat tiga sasaran dengan tiga indikator pada Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024**

No	Indikator	Capaian 2022	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap Target Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Persentase Masyarakat yang Dilayani Sesuai SOP	100%	100%	100%	100	100%	100
2.	Persentase Desa Mandiri	20%	27%	47%	174	40%	117
3.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	69,00	70,10	68,28	97	74,60	91

Capaian Indikator Utama Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024 berdasarkan tabel dapat dilihat sangat bervariasi. Untuk indikator persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP sudah sesuai dengan target. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan administrasi kecamatan yang sudah sesuai dengan SOP dan standar yang ditetapkan. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100% dengan capaian 100%.

Terkait indikator persentase desa mandiri dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM), dimana dari 15 desa yang ada di Kecamatan Mendo Barat, terdapat 7 desa sudah dikategorikan sebagai desa mandiri. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 27%, namun capaian melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 47%.

Indikator Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan target BB (70,10) dengan capaian belum sesuai target yaitu B (68,28) atau 97%.

### **Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum, Kecamatan Mendo Barat telah dapat dikatakan dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026. Terdapat (2) dua tujuan dengan (3) tiga sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra kecamatan.

Adapun pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024 dengan indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis**  
**Di Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100	100	100
2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	20	47	174
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70,10)	B (68,28)	97

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas, dapat diperoleh data dan informasi Kecamatan Mendo Barat sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Di Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Capaian
1	Melebihi/Melampaui Target	174%
2	Sesuai Target	100%
3	Tidak Mencapai Target	97%

**Tabel 3.9**  
**Pencapaian Target Sasaran**  
**Di Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (=100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	1	-	-	1	100	-	-
2	Sasaran 2	1	1	174	-	-	-	-
3	Sasaran 3	1	-	-	-	-	1	97
Jumlah		3	1	174	1	100	1	97

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan, diantaranya :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- Kinerja nyata dengan kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya, pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari (3) tiga sasaran dan (3) indikator kinerja dari (2) tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026.

**• Analisis Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir serta Target Akhir Renstra**

**- Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Perbandingan capaian kinerja atas indikator kinerja persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP tahun 2024 dengan tahun-tahun

sebelumnya dan target akhir dalam Renstra Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Terhadap Tahun**  
**Sebelumnya dan Target Akhir Renstra**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Persentase Masyarakat yang Dilayani Sesuai SOP	%	-	-	-	100	100

Membandingkan capaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang diukur dengan indikator Persentase Masyarakat yang Dilayani Sesuai SOP pada tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tertera pada Tabel 3.10 diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 sama dibandingkan dengan capaian target akhir dalam Renstra Tahun 2024-2026. Capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya tidak ada karena sasaran yang ingin dicapai untuk tahun 2024 berbeda dengan sasaran tahun sebelumnya. Sasaran kinerja tahun 2024 tercantum dalam Renstra Tahun 2024-2026 sedangkan sasaran tahun-tahun sebelumnya tercantum dalam Reviu Renstra Tahun 2021-2023.

Capaian kinerja nyata indikator persentase masyarakat yang dilayani sesuai SOP adalah sebesar 100% dengan target sebesar 100% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerja adalah 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik perizinan dan non perizinan sudah sesuai dengan SOP dan tepat waktu.

Adapun capaian kinerja ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dimana output program tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran yang dirinci sebagai berikut :



**Tabel 3.11**  
**Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan**

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/ Kurang	%
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	2.700.000	2.700.000	Jumlah Layanan Administrasi yang Tepat Waktu	Sangat Menunjang	100%

- **Sasaran 2 Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Perbandingan capaian kinerja atas indikator kinerja Persentase Desa Mandiri tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir dalam Renstra Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Terhadap Tahun Sebelumnya dan Target Akhir Renstra**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Persentase Desa Mandiri	%	-	20	33	47	40

Membandingkan capaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat yang diukur dengan indikator Persentase Desa Mandiri pada tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tertera pada Tabel 3.12 diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 melampaui target capaian akhir dalam Renstra Tahun 2024-2026. Capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sudah banyak desa yang ada dilingkup Kecamatan Mendo Barat yang berstatus desa mandiri. Adapun kategori desa mandiri mencakup seluruh aspek yang ada dipemerintahan desa seperti administrasi pelaporan, pengelolaan keuangan, penatausahaan, tingkat kemiskinan masyarakat, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan fasilitas penunjang yang ada di desa.

Capaian kinerja nyata indikator persentase desa mandiri adalah sebesar 47% dengan target sebesar 27% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerja adalah 174% atau melebihi target yang direncanakan. Peningkatan status desa dari berkembang menjadi mandiri terus meningkat dari tahun 2022 bahkan telah melampaui target akhir renstra Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026.

Adapun capaian kinerja ini didukung oleh beberapa program seperti :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

**Tabel 3.13**  
**Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan**

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/ Kurang	%
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.465.000	33.945.000	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrenbang Desa/Kel/Kecamatan	Sangat Menunjang	100%
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina		
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.800.000	4.800.000	Persentase Terlaksananya Koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	Sangat Menunjang	100%
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.470.000	29.595.000	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Hasil Monev	Sangat Menunjang	100%

- **Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Perbandingan capaian kinerja atas indikator kinerja Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir

dalam Renstra Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Terhadap Tahun Sebelumnya dan Target Akhir Renstra**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,73	69,00	67,95	68,28	73,25

Membandingkan capaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tertera pada Tabel 3.14 diatas, terlihat bahwa capaian kinerja di tahun 2024 belum mencapai target capaian akhir dalam Renstra Tahun 2024-2026. Capaian kinerja untuk (2) dua tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan meskipun sempat turun dari tahun 2022. Hal ini menjadi catatan untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen pendukung AKIP di tahun berikutnya.

Capaian kinerja nyata indikator Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah adalah sebesar 68,28 dengan target sebesar 70,10 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerja adalah 97% atau belum mencapai target yang direncanakan.

Adapun capaian kinerja ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan**

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/ Kurang	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.750.000	2.750.000	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Sangat Menunjang	100%
					Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai standar		

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.619.902.310	1.581.448.214	Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	Sangat Menunjang	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.485.383	99.832.400	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	Sangat Menunjang	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	762.275.995	750.941.900	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	Sangat Menunjang	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.400.000	199.400.000	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah	Sangat Menunjang	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.122.208	80.803.900	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Sangat Menunjang	100%

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah diukur melalui tolak ukur atau indikator kinerja Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka Panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan oleh Kecamatan Mendo Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100	100	100	Jumlah Masyarakat yang Dilayani Sesuai SOP	Pelayanan kepada masyarakat harus sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku
			Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	27	47	174	Jumlah Desa Mandiri	Pemerataan Pembangunan, Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB(70, 10)	B(68,28)	97	Pemenuhan Dokumen SAKIP	Peningkatan koordinasi dan Pemahaman tentang SAKIP

Uraian dari penjelasan tabel diatas adalah :

**1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Persentase Masyarakat yang Dilayani Sesuai SOP di Kecamatan Mendo Barat telah sesuai dengan target yang ditetapkan di dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah, baik Rencana Strategis Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

**Faktor Pendukung**

- SOP yang diterapkan sudah memadai dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- adanya dukungan dan peran aktif dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan;
- dana yang memadai.

**Faktor Penghambat**

- sarana dan prasarana kurang memadai;
- kondisi sosial budaya masyarakat terutama jarak yang jauh untuk sebagian desa sehingga pelayanan sedikit terhambat;
- kurangnya pemahaman bagi sebagian masyarakat tertentu terhadap SOP sesuai jenis pelayanan yang diberikan.

**Solusi/Perbaikan dan Rekomendasi**

- peningkatan kualitas sarana dan prasarana;
- menerapkan sistem pelayanan yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat yang jauh dari tempat pelayanan;
- sosialisasi SOP pelayanan kepada masyarakat.

**2. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan Mendo Barat telah melampaui target yang ditetapkan di dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah, baik Rencana Strategis Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target sebesar 27% dengan capaian 47% untuk tahun 2024, bahkan telah melampaui target akhir renstra yang ditetapkan sebesar 40%. Hal ini menjadi salah satu keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase desa mandiri dengan sasaran meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat.

**Faktor Pendukung**

- kelengkapan administrasi desa;
- penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa;
- pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- fasilitas penunjang di desa.

**Faktor Penghambat**

- Tingkat kemiskinan;

**Solusi/Perbaikan dan Rekomendasi**

- sosialisasi dan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
- sosialisasi terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- membangun sarana dan prasarana pendukung yang ada di desa.

**3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah**

Hasil evaluasi AKIP kecamatan belum mencapai target. Target yang ditetapkan adalah BB (70,10) dengan capaian B (68,28).

**Faktor Pendukung**

- a. dana yang memadai ;
- b. koordinasi yang baik dengan setiap jenjang jabatan dan semua seksi serta sub bagian

**Faktor Penghambat**

- a. kurangnya pemahaman serta pemenuhan akan dokumen-dokumen pendukung AKIP yang diperlukan sehingga capaian kinerja AKIP tahun 2024 belum maksimal.;
- b. kurang baiknya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan Mendo barat;
- c. monitoring dan evaluasi kinerja internal belum secara berkala dilaksanakan.

**Solusi/Perbaikan dan Rekomendasi**

- a. kualitas dokumen yang mendukung nilai AKIP akan diperbaiki dengan menjalin komunikasi dengan berbagai Perangkat Daerah yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen AKIP yang sesuai peraturan sehingga target nilai AKIP Kecamatan Mendo Barat semakin meningkat.
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan



sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.17**  
**Efisiensi Penggunaan Anggaran di Kecamatan Mendo Barat**  
**Tahun 2024**

No	Program	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100	94,04	5,96
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2	100	95,71	4,29
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	100	0
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	100	0
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	100	97,53	2,47

Di Kecamatan Mendo Barat jumlah pegawai per Desember 2024 terdiri dari 16 Orang PNS dan 32 Orang tenaga kontrak yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Dari segi jumlah sumber daya manusia maka di Kecamatan Mendo Barat cukup memadai namun dari segi kualitas bisa dikatakan kurang memadai karena minim nya jumlah PNS serta beberapa PNS saat ini sudah berusia diatas 50 tahun. Apalagi mengingat kondisi sistem kerja saat ini yang banyak menggunakan teknologi informasi sehingga pencapaian kinerja sedikit terhambat. Dengan jumlah pegawai sebanyak 48 orang di Kecamatan Mendo Barat maka sudah bisa dikatakan cukup efisien mengingat jumlah desa yang juga banyak jika dibandingkan dengan beberapa Kecamatan lainnya.

Dari segi sarana dan prasarana di Kecamatan Mendo Barat saat ini kurang memadai sehingga kurang mendukung pencapaian kinerja karena minimnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Kedepannya diharapkan ada penambahan anggaran untuk menambah sarana dan prasarana di Kecamatan Mendo Barat sehingga bisa memaksimalkan pencapaian kinerja seluruh pegawai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja bisa dilihat dari perbandingan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran serta realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan. Mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024, terdapat lima program, 10 Kegiatan dan 19 sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu :

**1. PROGRAM**

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- c. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- e. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

**2. KEGIATAN**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
- h. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- i. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- j. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

**3. SUB KEGIATAN**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- g. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- h. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- l. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- m. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- n. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- o. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- p. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- q. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- r. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
- s. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Evaluasi kinerja seluruh pegawai dilakukan melalui evaluasi penilaian kinerja terhadap sasaran kinerja pegawai yang telah disusun, evaluasi terhadap perjanjian kinerja dan perjanjian kinerja individu yang disusun, evaluasi rencana aksi dan evaluasi rencana kerja setiap akhir triwulan.

## B. Realisasi Anggaran

Adapun gambaran persentase realisasi anggaran pelaksanaan program yang mendukung kinerja sasaran tahun 2024 pada Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.18**  
**Besaran Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Tahun 2024**

No Rek	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	Persentase (%)
<b>5</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.858.370.896</b>	<b>2.786.216.414</b>	<b>97,48</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.658.970.896</b>	<b>2.586.816.414</b>	<b>97,29</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.619.642.310	1.581.213.214	97,63
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.039.328.586	1.005.603.200	96,76
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>199.400.000</b>	<b>199.400.000</b>	<b>100</b>
	Surplus/ (Defisit)	2.858.370.896	2.786.216.414	97,48
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	2.858.370.896	2.786.216.414	97,48

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pagu anggaran kecamatan Mendo Barat Tahun 2024 sebesar 2.858.370.896 dengan realisasi sebesar Rp 2.786.216.414 atau sebesar 97,48%. Terdapat pagu anggaran pada beberapa sub kegiatan yang mengalami penurunan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.

Adanya rasionalisasi anggaran tidak menurunkan kualitas pencapaian kinerja di Kecamatan Mendo Barat. Meskipun dengan anggaran yang terbatas namun pencapaian kinerja bisa dimaksimalkan dengan dukungan dan peran serta seluruh pegawai serta koordinasi yang tetap terjalin dengan berbagai pihak dan berbagai sektor. Misalnya rapat lintas sektor dengan beberapa Perangkat Daerah baik instansi vertikal maupun dengan berbagai pihak dilingkungan Kecamatan Mendo Barat dalam membahas beberapa permasalahan yang ada disekitar seperti penanganan stunting, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta isu-isu lain lainnya.

Secara rinci, realisasi belanja untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.19**  
**LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BELANJA		HASIL/KELUARAN			KETERANGAN	
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	2.783.935.896	2.715.176.414					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.750.000,00	2.750.000,00					APBD KAB.BANGKA
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6	6	Dokumen	Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun :	6 Dokumen
							- Renstra	1 Dokumen
							- Renja	1 Dokumen
							- Renja Perubahan	1 Dokumen
							- Rencana Aksi	1 Dokumen
							- Perkin	1 Dokumen
							- Perkin Perubahan	1 Dokumen
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.613.602.310,00	1.575.173.214,00					DAU
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			17	17	Orang/Bulan		
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.300.000,00	6.275.000,00					APBD KAB.BANGKA
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12	12	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun :	12 Dokumen
							- Laporan Bulanan	12 Dokumen
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00				Rasionalisasi Anggaran	APBD KAB.BANGKA

	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			5	0	Paket		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.340.967,00	52.888.000,00					APBD KAB. BANGKA
	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			14	14	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun	12 Laporan
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.572.208,00	23.472.200,00					APBD KAB. BANGKA
	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			12	12	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang disusun	12 Dokumen
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	23.572.208,00	23.472.200,00					APBD KAB. BANGKA
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12	12	Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang disusun	12 Dokumen
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00				Rasionalisasi Anggaran	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			15	0	Unit		
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.400.000,00	199.400.000,00				Pembayaran Kegiatan Tunda Bayar Tahun Anggaran 2023	APBD KAB. BANGKA
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	1	Paket	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket
							- Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	690.768.284,00	682.751.800,00					APBD KAB. BANGKA
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disusun	12 Laporan
7.01.01.2.08.02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.277.094,00	15.469.232,00					APBD KAB. BANGKA
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.230.617,00	52.720.868,00					APBD KAB. BANGKA
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.372.208,00	74.258.900,00					APBD KAB. BANGKA
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6	6	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	
							- Kendaraan Dinas Beroda Empat	2 Unit
							- Kendaraan Dinas Beroda Dua	4 Unit
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.750.000,00	6.545.000,00					APBD KAB. BANGKA
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15	15	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	
							- Komputer/Laptop	6 Unit
							- Printer	3 Unit
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.700.000,00	2.700.000,00					



7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.700.000,00	2.700.000,00					APBD KAB. BANGKA
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12	12	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
7.01.03	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>35.465.000,00</b>	<b>33.945.000</b>					
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.450.000,00	9.930.000,00					APBD KAB.BANGKA
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			105	105	Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	105 Lembaga
							(PKK, LPM, BKMT, Karang Taruna, RT, Gapoktan, Lembaga Adat ) X 15 Desa	7 Lembaga x 15 Desa = 105 Lembaga
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.015.000,00	24.015.000,00					APBD KAB.BANGKA
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			26	26	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang disusun :	26 Laporan
							- Laporan Gotong Royong	12 Laporan
							- Laporan Pemberdayaan Masyarakat	12 Laporan
							- Laporan Lomba Desa	1 Laporan

							- Laporan Pelaksanaan MTQ Kecamatan	1 Laporan
7.01.04	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>					
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>							
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00					APBD KAB.BANGKA
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			12	12	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang disusun :	24 Laporan
							- Laporan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan
7.01.06	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>31.470.000,00</b>	<b>29.595.000</b>					
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>							
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.950.000,00	19.695.000,00					APBD KAB.BANGKA
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			317	317	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	317 Dokumen
							- ADD	
							- DBH	
							- Laporan Keuangan Desa	
							- Laporan Semester	
							- Rancangan APBDES Induk dan Perubahan	
							- LKPJ Desa	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.350.000,00	3.230.000,00					APBD KAB.BANGKA

	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			1	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen
							- Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.170.000,00	6.670.000,00					APBD KAB.BANGKA
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			1	1	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan
							- Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan
<b>Jumlah</b>		<b>2.858.370.896</b>	<b>2.786.216.414</b>					

Berdasarkan rincian diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran Kecamatan Mendo Barat untuk Tahun 2024 sebesar Rp 2.858.370.896 dengan realisasi sebesar Rp 2.786.216.414 atau sebesar 97,48% dengan tingkat efisiensi sebesar 2,52%. Dengan persentase capaian tersebut maka dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran untuk tahun 2024 dikatakan sangat baik.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026 dan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Secara umum capaian kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 sangat memuaskan. Dari (2) dua tujuan yang ditetapkan dan dijabarkan dalam (3) tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024-2026 serta diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, sebanyak (1) satu sasaran memiliki capaian kinerja diatas 100 persen, (1) satu sasaran memiliki capaian kinerja 100 persen dan (1) satu sasaran yang capaian kinerjanya belum mencapai target yang ditetapkan.

Capaian realisasi anggaran Tahun 2024 di Kecamatan Mendo Barat pun sangat tinggi dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.858.370.896 dan realisasi sebesar Rp 2.786.216.414 atau dengan tingkat capaian sebesar 97,48%.

### **B. Rencana Tindak Lanjut**

Setelah disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024 dan setelah dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan maka dapat diambil rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Mempertahankan apa yang telah dicapai serta berusaha meningkatkan kinerja;
2. Melaksanakan program dan kegiatan serta yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini disusun sebagai sarana pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja yang diperjanjikan guna perbaikan kinerja di masa mendatang.



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HISMUNANDAR, SH  
Jabatan : CAMAT MENDO BARAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HARIS AR, AP., M.H  
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA



M. HARIS AR, AP., M.H

Sungailiat, 29 Januari 2024  
PIHAK PERTAMA



HISMUNANDAR, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19670225 199503 1 001

## PERJANJIAN KINERJA

**SKPD** : KECAMATAN MENDO BARAT  
**TAHUN ANGGARAN** : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang Dilayani Sesuai SOP	%	100
2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	27,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori /Nilai	BB (70,10)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.520.037.514,00	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.700.000,00	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	48.705.000,00	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.800.000,00	APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.470.000,00	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>2.607.712.514,00</b>	

PIHAK KEDUA

M. HARIS AR, AP., M.H

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

KECAMATAN  
MENDO BARAT

HISMANANDAR, SH  
PEMBINA TK. I

NIG.416670225 199503 1 001





**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HISMUNANDAR, S.H.  
Jabatan : CAMAT MENDO BARAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HARIS AR, AP., M.H.  
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

  
PIHAK KEDUA  
M. HARIS AR, AP., M.H.

Sungailiat, 11 November 2024  
  
PIHAK PERTAMA  
HISMUNANDAR, S.H.  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19670225 199503 1 001




## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**SKPD : KECAMATAN MENDO BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN : 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang Dilayani Sesuai SOP	%	100	100
2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	27,00	27,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai	BB (70,10)	BB (70,10)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.520.037.514	2.783.935.896	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.700.000	2.700.000	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	48.705.000	35.465.000	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.800.000	4.800.000	APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.470.000	31.470.000	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>2.607.712.514</b>	<b>2.858.370.896</b>	

  
PIHAK KEDUA  
M. HARIS AR, AP., M.H.

Sunggailiat, 11 November 2024  
PIHAK PERTAMA  
  
HISMUNANDAR, S.H.  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19670225 199503 1 001

**REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2024**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	Nilai	25.50		0
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	BB (70,10)	B (68,28)	97
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai	25.10	22.16	88
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai	11.35	11.07	98
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Persentase	0.00	0.00	0
		Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks	62.00	56.90	92
		Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks	3.00	3.00	100
		Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Indeks	83.00	90.00	108
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persentase	100	100.00	100
			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Persentase	100	100.00	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Dokumen	6	6	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar	Persentase	100	100.00	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	17	17	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	14	14	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Persentase	11.00	11.00	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	100
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (87,00)	B (87,00)	100
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	Persentase	100	100	100
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Publik	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	Persentase	100	100	100
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	Persentase	100	100	100

	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100
		<b>Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Persentase Desa Mandiri</b>	<b>Persentase</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>174</b>
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan</b>	<b>Persentase Desa/Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kel/Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrenbang Desa/Kel/Kecamatan	Persentase	100	100	100
		<b>Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	lembaga	105	105	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	26	26	100
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Trantibum</b>	<b>Persentase Tomas/Toga/Topa yang Berperan Aktif Dalam Menjaga Trantibum</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan dengan Tomas/Toga/Topa	Persentase Terlaksananya Koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	Persentase	100	100	100
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	12	100
V	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Meningkatnya Efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Desa</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Hasil Monev	Persentase	100	100	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	317	317	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	1	1	100

CAMAT MENDO BARAT


  
 HISMUNANDAR, SH
   
 Pembina TK. I / I/b
   
 NIP. 19670225 199503 1 001